



PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

RANCANGAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
INSPEKTORAT KOTA BEKASI
TAHUN 2026

Inspektorat Kota Bekasi

Rencana Kerja 2026

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga “***Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026***” telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat Kota Bekasi disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, Oktober 2024

Inspektur Kota Bekasi,



Iis Widyasnuwati, S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE,QGIA

DAFTAR ISI

Halaman

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	23
2.2.1. Persentase Tindaklanjut Temuan Internal	25
2.2.2. Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	26
2.2.3. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	27
2.2.4. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas.....	29
2.2.5. Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan keuangan yang akuntabel.....	33
2.2.6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi	38
2.4. <i>Reviu</i> terhadap Rancangan Awal RKPD.....	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT

DAERAH KOTA BEKASI	58
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat	60
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi	62
3.3.1. Tujuan	62
3.3.2. Sasaran	63
3.4. Program dan Kegiatan	64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT..... 66

BAB V PENUTUP..... 76

5.1. Catatan evaluasi awal dan rencana tindak lanjut	76
--	----

5.2. Kaidah pelaksanaan..... 77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS ITKO S.D TAHUN 2024 KOTA BEKASI.....	11
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	24
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	26
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	27
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	28
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	30
Tabel 2. 7 Persentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel	33
Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP.....	34
Tabel 2. 9 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi	35
Tabel 2. 10 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI.....	38
Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
Tabel 2. 12 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026.....	51
Tabel 2. 13 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bekasi.....	57
Tabel 3. 1 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	61
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026	64
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Hasil Verifikasi).....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja.....	2
Gambar 3. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) yang ditetapkan oleh kepala PD. Rancangan Renja-PD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra-PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

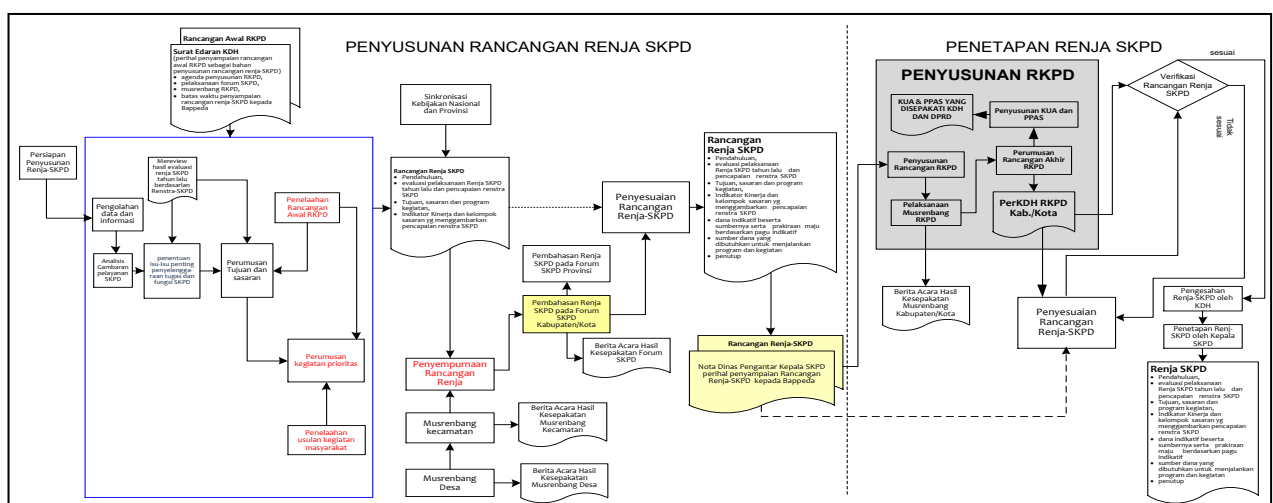
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 7 mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada RKPD. Sementara RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) juga memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program, kegiatan dan subkegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-PD dibahas dalam forum PD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-PD) kedalam rencana dan program. Renja-PD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra-PD kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Penjabaran dari Renstra-PD sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya”. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dari pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2025-2029, Proses penyusunan Renja-PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Gambar 1. 1
Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan" dan "penjaminan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 6 Paraf Koordinasi: Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 82 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan serta menyediakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan gambaran kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tujuan serta sasaran untuk dijadikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;
2. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Mendukung tercapainya RPJMD Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029.

1.4. Sistematika

Penyajian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi tahun lalu dan capaian kinerja terhadap Renstra.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RPD

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 47.244.416.279,-.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2). Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 3). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun program-program dan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 43.175.075.279,- didukung dengan 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan alokasi dana sebesar Rp. 1.653.956.000,- dengan 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, alokasi dana sebesar Rp. 2.415.385.000- didukung dengan 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 **mencapai 98.82%** dan realisasi **keuangan 89.43%**, sehingga efisiensi biaya pada tingkat program hingga 10.57%. Persentase efisiensi tersebut dikarenakan pada

level kegiatan terdapat banyak efisiensi penggunaan sumber daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang tidak diserap serta kegiatan yang anggarannya direlokasi pada kegiatan lain yang lebih menunjang capaian kinerja Inspektorat. Namun demikian secara fisik kegiatan yang alokasi anggarannya dialihkan tetap dilaksanakan dan menghasilkan output sebagaimana direncanakan.

Upaya efisiensi anggaran telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD ke kantor Inspektorat dan juga melalui Daring (personal meeting) dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien dilakukan pula peningkatan kabapilitas APIP yaitu dengan memanggil narasumber ahli juga kompeten baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak swasta untuk melakukan transfer pengetahuan kepada APIP Kota Bekasi.

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 melaksanakan 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program-program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.175.075.279,- meliputi 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.653.956.000,- meliputi 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.415.385.000,- meliputi 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Rencana Kerja 2026

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO DAN
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS ITKO S.D TAHUN 2024
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	#N/A	13 Laporan	13 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	#N/A	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	100	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	100%
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	#N/A	10 Laporan	10 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	#N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	#N/A	70 Orang	70 Orang	100	120 Orang	120 Orang	100%
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	#N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	#N/A	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100%
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	#N/A	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100%
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	#N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	#N/A	400 Laporan	400 Laporan	100	100 Laporan	450 Laporan	100%
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhi kebutuhan Barang milik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	5 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	44 Unit	44 Unit	100	25 Unit	25 Unit	100%
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	#N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	4 Laporan	100 Laporan	100%
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	#N/A	36 Laporan	36 Laporan	100	4 Laporan	24 Laporan	100%
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	#N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	1	1	2						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah peralatan dan kendaraan	100%					100%	100%	100%
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	#N/A	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	12 Unit	100%
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	#N/A	37 Unit	37 Unit	100	12 Unit	12 Unit	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	#N/A	156 Unit	156 Unit	100	239Unit	200 Unit	100%
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	#N/A	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	100%
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
						Persenatase Tindak Lanjut Temuan Internal	74.50							
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	86.55							

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan	5 Dok					18	18	100%
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	1	#N/A	4	100	4 Lap	4 Lap	100%
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Lap	#N/A	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100%
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Lap	#N/A	5 Laporan	5 Laporan	100	8 Lap	8 Lap	100%
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 PD	#N/A	2 Laporan	2 Laporan	100	44 PD	44 PD	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	#N/A	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	1 Kesepak	1 Kesepak	100%
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	#N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100	2 Dokumen	32Dokumen	100%
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	5Dok					2 Dok	2 Dok	100%
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	#N/A	1 Laporan	1 Laporan	100	5 Laporan	7 Laporan	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-							
						Indeks Manajemen Risiko	100							
						Nilai MCSP Level Kapabilitas APIP	3							
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan	2 Dok					5 Dok	5 Dok	100%
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	#N/A	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	#N/A	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	5 Dok					5 Dok	5 Dok	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	3 PD	#N/A	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100	6 PD	6 PD	100%
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 PD	#N/A	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	100	44 PD	44 PD	100%
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	#N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Rencana Kerja 2026

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 PD	#N/A	#N/A	#N/A		44 PD	44 PD	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2024 adalah tahun pertama dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026. Tentu saja perlu dilakukan analisis untuk mengetahui berbagai aspek pelayanan yang telah diberikan Inspektorat Kota Bekasi. Analisis Pelayanan adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu layanan atau pelayanan yang diberikan. Ini melibatkan pengumpulan data, pengukuran, dan penilaian berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, kualitas, kepuasan pelanggan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan kata lain, analisis kinerja pelayanan bukan hanya membantu dalam memelihara kualitas layanan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui kepuasan pelayanan yang lebih baik selama tahun 2024.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis

yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 3, sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	74.49	93.11
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90	86.50	96.11
		Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01	36	36	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	98	81.81	83.48
		Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	100	100	100
		Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3	3	100

Sumber : Realisasi capaian Kinerja Itko 2024

Dari data tersebut di atas, harus diakui bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengalami penurunan capaian target kinerja, meski ada pada baian lain yang tetap tercapai dengan baik.

Adanya penurunan capaian indikator persentase tindak lanjut temuan Internal yang hanya tercapai 74.49 dari taget 80 dan persentase, Tindak Lanjut temuan Eksternal yang tercapai 86.50 dari target 90 yang ditargetkan pada tahun ini. Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas yang tercapai 81.81 dari 98 yang ditargetkan merupakan indikasi masih lemahnya peran pengawasan Inspektorat selian tentu saja peran perangengkat dengan komitemnnya. Beberapa penyebab dari penurunan tersebut terindikasi antara lain :

1. Masih kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil temuan baik internal maupun eksternal;
2. Belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menindaklanjuti

Inspektorat Daerah Kota Bekasi

rekomendasi hasil pengawasan APIP dan juga hasil pemeriksaan BPKP/BPK

3. Komitmen yang lemah dari pimpinan OPD untuk melaksanakan kinerja berbasis SPIP.
4. Keterbatasan SDM yang mumpuni yang mampu menerapkan akuntabilitas kinerja.

2.2.1. Persentase Tindaklanjut Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal	Persen	80.00	74.49	93.11

Sumber: realisasi tindaklanjuti hasil temuan internal sampai dengan triwulan IV 2024

Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja PD serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang. Realisasi pencapaian target indikator ini bersumber dari Tindak lanjut temuan internal sampai dengan triwulan IV tahun 2024 .

2.2.2. Persentase Tindaklanjuti Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	

Tabel 2. 4

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	Persen	90	86.50	96.11

Sumber: rekapitulasi hasil tindaklanjut temuan eksternal sampai derngan triwulan IV 2024

Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Tindak lanjut Audit tahun sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

2.2.3. Persentase Pearangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Penyelenggaraan atas penerapan SPIP sudah melibatkan seluruh OPD dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah. Namun untuk penilaian masih Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa:

1. SPIP mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risks, and Control);
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;

3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah;
4. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: Strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan; dan
6. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan.

Dengan ketentuan ini tidak semua OPD dijadikan sebagai area penilaian SPIP terintegrasi, mengingat tidak semua OPD memiliki daya ungkit kematangan SPIP.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal 3.01}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	36	36	100

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022/2023

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan capaian kinerja yang terealisasi dari target 36 dengan realisasi sebesar 36 atau 100 %.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan pada 10 (Sepuluh) Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) DBMPTSP;
- 3) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Dinas Sosial;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) Dinas Tata Ruang;
- 8) BPKAD;
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah CAM.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024. Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023/2024, Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan nilai 2.720 poin, artinya Pemerintah Kota Bekasi belum dapat mencapai target 3.01.

2.2.4. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

dan untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu dan evaluasi atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP		INTERPRETASI
		NILAI	KATEGORI	
1	DINAS PENDIDIKAN	60,05	B	Baik
2	DINAS KESEHATAN	80,67	A	Memuaskan
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID	84,58	A	Memuaskan
4	DINAS TATA RUANG	78,92	bb	Sangat Baik
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	79,94	bb	Sangat Baik
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	69,25	B	Baik

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP		INTERPRETASI
		NILAI	KATEGORI	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64,26	B	Baik
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	78,33	BB	Sangat Baik
9	DINAS SOSIAL	77,29	BB	Sangat Baik
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60,10	B	Baik
11	DINAS TENAGA KERJA	61,63	B	Baik
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80,35	A	Memuaskan
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	79,48	BB	Sangat Baik
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78,56	BB	Sangat Baik
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81,59	A	Memuaskan
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	74,53	BB	Sangat Baik
17	DINAS PERHUBUNGAN	80,03	A	Memuaskan
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	80,67	A	Memuaskan
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	78,19	BB	Sangat Baik
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	84,97	A	Memuaskan
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	74,51	BB	Sangat Baik
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	68,89	B	Baik
23	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	70,03	BB	Sangat Baik
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	80,03	A	Memuaskan
25	SEKRETARIAT DAERAH	82,04	A	Memuaskan
26	SEKRETARIAT DPRD	69,62	B	Baik
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	85,02	A	Memuaskan
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	81,43	A	Memuaskan

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP		INTERPRETASI
		NILAI	KATEGORI	
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	78,07	BB	Sangat Baik
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	81,02	A	Memuaskan
31	INSPEKTORAT KOTA	84,57	A	Memuaskan
32	KECAMATAN BEKASI TIMUR	76,55	BB	Sangat Baik
33	KECAMATAN BEKASI BARAT	62,81	B	Baik
34	KECAMATAN BEKASI UTARA	72,74	BB	Sangat Baik
35	KECAMATAN BEKASI SELATAN	75,16	BB	Sangat Baik
36	KECAMATAN MEDANSATRIA	78,90	BB	Sangat Baik
37	KECAMATAN RAWALUMBU	77,90	BB	Sangat Baik
38	KECAMATAN BANTARGEBAH	74,78	BB	Sangat Baik
39	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	74,85	BB	Sangat Baik
40	KECAMATAN JATIASIH	60,23	B	Baik
41	KECAMATAN PONDOKGEDE	77,14	BB	Sangat Baik
42	KECAMATAN JATISAMPURNA	75,57	BB	Sangat Baik
43	KECAMATAN PONDOKMELATI	75,14	BB	Sangat Baik
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76,72	BB	Sangat Baik

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori “BB” ke atas pada tahun 2024 adalah sebanyak 81.81% dari target 98%, dikarenakan ada 8 perangkat daerah yang memperoleh nilai dibawah 70 yang berarti memperoleh predikat B kebawah. Penyebabnya adalah kurangnya bukti yang mampu mengungkit penguatan nilai, menjadi salah satu sebab AKIP perangkat daerah tidak tercapai. Akibatnya dapat dilihat bahwa capaian Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori “BB” ke atas) Tahun 2024 tidak mencapai target.

2.2.5. Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan keuangan yang akuntabel

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan keniscayaan dan sebagai tolok ukur yang sangat penting. Akuntabilitas memberikan kepastian dana yang dikelola digunakan dengan cara yang benar, efisien, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Perangkat Daerah yang mengelola anggaran atau dana harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber, penggunaan, dan hasil dari dana tersebut.

Akuntabilitas keuangan juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas laporan keuangan dan mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Keberhasilan pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi tersebut.

Tabel 2. 7
Persentase Perangkat Daerah dengan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	Persen	100	100	100

Sumber: hasil LHA keuangan OPD tahun 2024

Dari hasil Analisa terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah, didapatkan hasil bahwa sebenarnya akuntabilitas pengelolaan anggaran perangkat daerah sudah cukup baik dan memenuhi standar penggunaan dan pengelolaan keuangan, meki tidak dipungkiri masih perlu dilakukan monitoring yang intensif agar potensi penyimpangan atau fraud terminimalisir.

2.2.6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi consulting dan quality assurance atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Laporan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Oleh BPKP

Tabel 2. 8
Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3.18	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Bekasi tahun 2024

Hasil tersebut di atas diperoleh sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 oleh BPKP dengan Nomor PE.09.03/LHP-416/PW10/6/2024 Tanggal 9 September 2024.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi diperoleh simpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi berada pada level 3 (*delivered*) dengan skor 3,180 sebagaimana uraian berikut:

Tabel 2. 9

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,180

Sumber: Laporan hasil penilaian mandiri BPKP 2024

Penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP diarahkan untuk mewujudkan standar dan hasil pengawasan APIP yang berkualitas minimal mencakup

- (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis;
- (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR;
- (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola sesuai pemenuhan karakteristik Level 3 (*delivered*).

Apabila terpenuhi level 3, maka diharapkan APIP dapat melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi agar APIP menjadi mitra strategis organisasi sesuai karakteristik Level 4 (*institutionalized*), dan diharapkan jangka panjang, APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai karakteristik Level 5 (*optimized*).

Tabel 2. 10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO			REALISASI CAPAIAN			P
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Persentase tindak lanjut temuan Internal	-	-	80%	80%	86%	74,49 %	-	-	
2.	Persentase Tindak lanjut Temuan Eksternal	-	-	91%	91%	91%	86,5%	-	-	
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	-	-	100%	100%	100%	100	-	-	
4	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,01	-	-	36	39	41	36	38	-	
5	Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	-	-	98	100	100	81,81	-	-	
6	Tingkat Level Kapabilitas APIP	-	-	3	3	3	3	3	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyebutkan bahwa Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 11

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal sehingga masih adanya temuan yang berulang baik internal maupun eksternal yang berdampak secara administrasi maupun secara hukum	Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas.	Lemahnya pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah Kurang optimalnya penyusunan perencanaan di perangkat daerah Masih adanya Perencanaan PD yang tidak sinkron dengan dengan perencanaan tingkat Kota Kurangnya SDM penyusun laporan keuangan di perangkat daerah yang kompeten Perencanaan alokasi anggaran dan pencairan yang menumpuk diakhir tahun

Rencana Kerja 2026

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap waktu penyusunan laporan keuangan yang terlalu singkat Lemahnya kerjasama antar lembaga Perbedaan persepsi antar lembaga Rendanya tindak lanjut temuan pada perangkat daerah Bahasa rekomendasi yang susah dipahami sehingga rekomendasi sulit untuk ditindaklanjuti Kesenjangan kemampuan APIP Tidak ada bagian evaluasi pelaporan
		masih adanya temuan berdampak hukum yang melibatkan aparat sipil negara	Rendahnya sanksi bagi aparat yang tidak menindak lanjuti hasil temuan Masih rendahnya hukuman disiplin bagi pelaku pelanggaran Pelaku yang sudah terbukti melanggar berdasarkan hasil audit tidak dilimpahkan ke aparat penegak hukum
2	Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pendampingan dan asistensi yang efektif dan menghasilkan kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi yang berkualitas	Belum semua perangkat daerah memiliki risk register dan manajemen resiko Belum tersedia aplikasi pelaksanaan pengawasan yang baik Kurang kompetensi SDM penyusun kebijakan pengawasan Kebijakan pengawasan yang sudah disusun tidak dilaksanakan Publikasi pengawasan yang belum optimal lemahnya pengetahuan tentang urusan wajib perangkat daerah yang harus dilaksanakan Belum berkembangnya kesadaran perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Lemahnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah Masih rendahnya persepsi anti

Rencana Kerja 2026

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			korupsi
			Masih ditemukannya gratifikasi dan pungutan liar oleh oknum aparat
			Lemahnya pemenuhan eviden evaluasi SAKIP, LPPD LKPD, SPIP

Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Komitmen pimpinan untuk menerapkan kinerja yang baik dan pengendalian intern yang instensif.
2. Komitmen dan kompetensi APIP dalam mengevaluasi peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah se-Kota Bekasi yang akuntabel;
3. Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang terintegrasi;
4. Dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bekasi terkait dengan Tujuan Pertama yaitu “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Road Maps Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang kapabel dan kompeten.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti :

- a. Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko;
- b. Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
- c. Whistle blowing system belum berjalan efektif dan dimanfaatkan oleh seluruh aparatur;
- d. Penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (berupa Peraturan Walikota);
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system;
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan;

- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko;
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.4. *Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD*

RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Terkait hal tersebut, berpedoman pada RKPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pemenuhan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Reviu terhadap Rancangan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

Rencana Kerja 2026

Tabel 2. 12
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan				46.740.335.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan				46.740.335.300	
					100%			Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran			100%		
					95			Persentase Capaian Kinerja Keuangan			95		
					86,9			IP ASN			86,9		
					100%			Persentase Pengelolaan Barang Milik			100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang diselesaikan			100%	25.560.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang diselesaikan			100%	25.560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinera SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	25.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinera SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	25.560.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100%	41.114.931.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100%	41.114.931.300	

Rencana Kerja 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	113Orang/bulan	41.114.931.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	113 Orang/bulan	41.114.931.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	15.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	1.500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	1.500.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	250.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	250.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	75 Orang	1.250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	75 Orang	1.250.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Adminisrasi Perangkat Daerah			100%	3.154.088.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Adminisrasi Perangkat Daerah			100%	3.154.088.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	420.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	420.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	372.304.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	372.304.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	60.000.000	

Rencana Kerja 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	50 Laporan	1.951.784.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	50 Laporan	1.951.784.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan			100%	981.769.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan			100%	366.175.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	5 Unit	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	5 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	45 Unit	366.175.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	45 Unit	366.175.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahana Daerah			100%	83.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahana Daerah			100%	78.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	0 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	100 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	24 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	78.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	78.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang terpelihara dengan baik			100%	481.581.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang terpelihara dengan baik			100%	481.581.000	

Rencana Kerja 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Unit	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	51 Unit	235.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	51 Unit	235.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	239 Unit	105.881.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	239 Unit	105.881.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				1.540.220.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				1.540.220.000	
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			74.55			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			74.55		
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			86.6			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			86.6		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/pengasawan yang ditindak lanjuti				1.190.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/pengasawan yang ditindak lanjuti				1.190.000.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Lap	200.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Lap	200.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Lap	150.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Lap	150.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	8 Lap	200.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	8 Lap	200.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	300.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	300.000.000	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	46.820.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	46.820.000	

Rencana Kerja 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Dokumen	164.800.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Dokumen	164.800.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan kerugian yang diselesaikan	2 Dokumen			300.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan kerugian yang diselesaikan				300.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	100.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	5 Laporan	200.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Laporan	200.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya pembinaan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah Daerah			-	1.319.118.800	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya pembinaan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah Daerah			-	1.319.118.800	
		Indeks Manajemen Risiko			36%			Indeks Manajemen Risiko			36%		
		Nilai MCSP KPK			98%			Nilai MCSP KPK			98%		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang dihasilkan	3			460.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang dihasilkan				460.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	260.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	260.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Rekomendasi	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Rekomendasi	200.000.000	

Rencana Kerja 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan				859.118.800	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan				859.118.800	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	6 PD	144.118.800	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	6 PD	144.118.800	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	200.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	200.000.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	450.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	450.000.000	
	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	65.000.000	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	65.000.000	
						49.117.577.8800						49.117.577.8800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak mendapat usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan juga Tingkat Kota maupun melalui hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Tabel 2. 13
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kota Bekasi

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

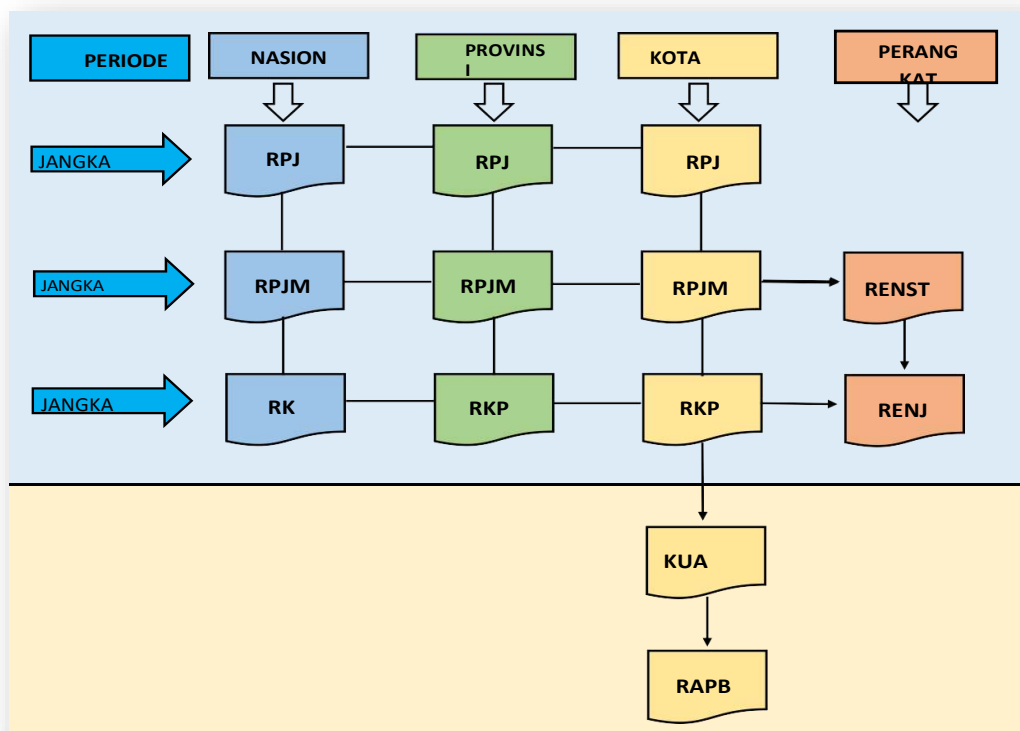
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Gambar 3. 1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi



Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan pusat/nasional karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Telaahan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan nasional yaitu terkait arah kebijakan dan/atau tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2025. Sementara itu, tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2020-2025 antara lain:

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026 mengacu pada ketentuan dalam sebagaimana disebutkan dalam Inmendagri No. 52 Tahun 2022. Sementara secara teknis, hubungan kedua dokumen perencanaan jangka menengah ini dan penyelarasan yang dilakukan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Telaahan juga dilakukan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu -isu strategis PD yang akan ditangani pada Renja PD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.

1. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Indikator sasaran :

1.1 Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.

2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;

Indikator sasaran :

1.1 Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya > BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

Indikator sasaran :

- 3.1 Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.
- 3.2 Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang opini atas LKPD adalah WTP.
4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;
Indikator sasaran :
- 4.1 Tingkat maturitas implementasi SPIP.
- 4.2 Nilai Indikator RAD-PPK.
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.
Indikator sasaran :
Tingkat Kapabilitas APIP.

Tabel 3. 1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat
		2	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	3	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
		4	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIPnya adalah BB
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	5	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat
		6	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP
4	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas	7	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		8	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan	9	Tingkat Kapabilitas APIP

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2026, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

3.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota bidang Pengawasan”, dengan indikator tujuan yaitu “Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kota Bekasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;

- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap dan gratifikasi;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 8) Penanganan dan pengaduan whistleblowing system;
- 9) Penanganan benturan kepentingan.

3.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu: “Meningkatkan pengawasan intern Pemerintah dan Meningkatkan Efektifitas Pencegahan Korupsi” (IEPK)

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota bidang Pengawasan		Nilai SPIP Terintegrasi Kota Bekasi	3
		Meningkatkan Pengawasan Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	3
		Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Nilai IEPK	3

3.4. Program dan Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 salah satunya adalah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”. Yakni adanya perbaikan dan peningkatan dalam cara Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengelola sumber daya dan menjalankan program-program serta kebijakan untuk tercapainya tujuan organisasi setidaknya mencakup dua hal:

1. **Manajemen Inspektorat Daerah Kota Bekasi:** Mengacu pada kemampuan Inspektorat Kota Bekasi dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol kegiatan pemerintahan dengan lebih efisien dan efektif. Misalnya, peningkatan sistem pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia), serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. **Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi:** Menunjukkan sejauh mana Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat mencapai tujuan kinerjanya. Kinerja ini bisa diukur dari sejauh mana program dan kebijakan berhasil dijalankan, serta dampaknya terhadap Pemerintah Kota Bekasi.

Rencana Kerja 2026

Secara umum bisa dimaknai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih berdampak positif bagi Pemerintah kota Bekasi dan masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan urusan pengelolaan keuangan dan aset, aparatur, pembangunan dan pelayanan publik, serta pencegahan dan investigasi.

Untuk Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) dan sub kegiatan sebanyak 18 (delapan belas),
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan, dan
3. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan.

Penyusunan atas program kegiatan dan sub kegiatan dilakukan mengikuti Peraturan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahirabn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini meliputi 2 kegiatan:

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Reviu Laporan Kinerja
- c. Reviu Laporan Keuangan
- d. Kerjasama Pengawasan Internal
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

1.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan:

- a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini meliputi 2 kegiatan :

2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2.2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Program ini meliputi 7 kegiatan:

- 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan bahan logistic kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - d. Pengadaan Mebel
 - e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rencana Kerja 2026

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Kerja 2026

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Hasil Verifikasi)

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
1					2	3		9	10		8		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan			48.952.906.160				50.830.000.000
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100				100	
						IP ASN		95				95	
						Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		86,9				86,9	
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	25.260.000	PAD		100%	100.000.000
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	25.560.000	PAD		1 Laporan	100.000.000
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	44.892.881.000			100%	45.010.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	120 Orang/bulan	44.877.881.000	PAD		120 Orang/bulan	45.000.000.000

Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	1.600.000.000	PAD		100%	1.400.000.000
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	0 Paket	-	PAD		1 Paket	200.000.000
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	120 Orang	1.600.000.000	PAD		120 Orang	1.200.000.000
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	2.292.304.000	PAD		100%	2.810.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Paket	-	PAD		1 Paket	50.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	420.000.000	PAD		4 Paket	400.000.000
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	272.304.000	PAD		2 Paket	400.000.000
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Dokumen	-	PAD		1 Dokume	60.000.000
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	300.000.000
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	500 Laporan	1.400.000.000	PAD		500 Laporan	1.600.000.000

Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	-	PAD		100%	810.000.000
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Unit	-	PAD		1 Unit	60.000.000
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Unit	-	PAD		20 Unit	750.000.000
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	246.000.000	PAD		100%	179.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	0 Laporan	-	PAD		100 Laporan	15.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		24 Laporan	30.000.000
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	246.000.000	PAD		12 Laporan	130.000.000
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi		481.581.000	PAD		100%	885.000.000
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	140.000.000	PAD		12 Unit	250.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	38 Unit	235.700.000	PAD		12 Unit	450.000.000

Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	200 Unit	105.881.000	PAD		200 Unit	185.000.000
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Unit	0
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.540.220.000				2.350.000.000
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal		80%				80%	
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal		91%				91%	
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel		100%				100%	
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan	Kota Bekasi	6 Dokumen	1.240.220.000	PAD		5 Dok	1.800.000.000
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Lap	178.600.000	PAD		1 Lap	350.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	4 Lap	150.000.000	PAD		4 Lap	250.000.000
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Bekasi	8 Lap	400.000.000	PAD		8 Lap	300.000.000
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Bekasi	44PD	300.000.000	PAD		44PD	250.000.000
6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Bekasi	1 Kesepakatan	46.820.000	PAD		1 Kesepakatan	350.000.000
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Kota Bekasi	3 dokumen	164.800.000	PAD		3 Dokumen	300.000.000

Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
					Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	Kota Bekasi	2 Dokumen	300.000.000	PAD		5 Dok	600.000.000
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Bekasi	1 Laporan	100.000.000	PAD		1 Laporan	200.000.000
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Bekasi	7 Laporan	200.000.000			7 Laporan	400.000.000
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-	2.950.000.000				2.950.000.000
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01		39					
						Level Kapabilitas APIP		Level 3					
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%					
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan	Kota Bekasi	2 Produk Kebijakan Pengawasan	400.000.000	PAD		5 Dok	900.000.000
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	1 Rekomendasi	200.000.000	PAD		1 Rekomendasi	600.000.000
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	2 Rekomendasi	200.000.000	PAD		2 Rekomendasi	300.000.000

Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun N 2026				Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2027	
							Lokasi	Target	Pagu	Sumber Dana		Target	Pagu
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Kota Bekasi	4 Dokumen	787.646.800	PAD		5 Dok	2.350.000.000
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	3 PD	100.000.000	PAD		3 PD	300.000.000
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bekasi	44 PD	250.000.000	PAD		44 PD	350.000.000
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bekasi	2 Kegiatan	387.646.800	PAD		2 Kegiatan	1.600.000.000
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bekasi	44 PD	50.000.000	PAD		44 PD	100.000.000
					Jumlah				52.266.192.800			44 PD	56.540.000.000

5.1. Catatan evaluasi awal dan rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk tahun kerja 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* dan *outcome* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja ini melibatkan seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan turunan peraturan perundang-undangannya dipastikan akan mengubah model program, kodifikasi dan sistem kinerja yang dibangun dan disesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Karena itu Renja tidaklah bersifat statis tetapi dinamis yang rumusan kebijakan dan rencananya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa kegiatan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan pada bab bab Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi catatan dan sekaligus bahan introspeksi bagi Inspektorat untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan

(mitigasi) untuk tidak terulang lagi pada Tahun 2026. Anggaran yang disediakan meski jika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 15 Tahun 2024 belum cukup memadai d namun dalam pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan secara maksimal dalam rangka memenuhi target kinerja organisasi.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah pedoman kerja untuk dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan, namun demikian pada praktiknya tetap memperhatikan prioritas sebagaimana telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi terikat secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana kerja (Renja) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 melalui Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, yang hasilnya dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama Tahun 2026, Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan dan kerja yang maksimal.

Rencana Kerja 2026

Demikian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja juga mendukung capaian kinerja pemerintah Kota Bekasi secara komprehensif.

Bekasi, Desember 2024

INSPEKTUR KOTA BEKASI,



ISSYNUWATI, S.Sos, CRA., CRP., CGCAE, QGIA
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002